

GOOD TOURISM GOVERNANCE DALAM PROGRAM UNGGULAN SATU NAGARI SATU EVENT DI KABUPATEN TANAH DATAR

Adinda Putri Maharani¹, Novie Indrawati Sagita², Agus Taryana³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Email Korespondensi: adinda22004@mail.unpad.ac.id

Submitted: 19-06-2026; Accepted: 19-09-2026; Published : 19-09-2026

ABSTRAK

Misi ke 4 tahun 2021-2026 Kabupaten Tanah Datar adalah “Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya, dan sumber daya alam”, yang diwujudkan dalam inovasi Program Unggulan Satu Nagari Satu Event. Namun dalam pengimplementasiannya, terdapat kesenjangan antara prinsip ideal tata kelola kepariwisataan yang baik dan praktik pengelolaan SNSE di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis penerapan 7 prinsip *good tourism governance* Sunaryo dalam penyelenggaraan Program Satu Nagari Satu Event. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, mengumpulkan data melalui studi kepustakaan, observasi, wawancara, yang kemudian dianalisis secara interaktif dengan teknik yang dikemukakan oleh Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan Program Satu Nagari Satu Event di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2024 belum berjalan optimal berdasarkan tujuh prinsip *Good Tourism Governance*. Program ini telah menunjukkan keberhasilan dalam mengangkat identitas budaya lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, serta memperkuat promosi dan branding Kabupaten Tanah Datar sebagai kabupaten event. Namun demikian, program belum mampu mewujudkan tata kelola kepariwisataan yang berkelanjutan, karena masih terdapat keterbatasan pada aspek partisipasi strategis masyarakat, kemitraan, pengembangan kapasitas SDM, monitoring dan evaluasi, serta keberlanjutan pengelolaan program pasca kegiatan.

Kata kunci: Teori *good tourism governance*, Program Satu Nagari Satu Event, pariwisata berkelanjutan.

ABSTRACT

The fourth mission of Tanah Datar Regency for 2021–2026 is “Sustainable tourism development based on customs, culture, and natural resources,” which is realized through the innovative “One Village, One Event” (SNSE) flagship program. However, in its implementation, there is a gap between the ideal principles of good tourism governance and the actual management practices of the SNSE program on the ground. Therefore, this study analyzes the application of Sunaryo’s seven principles of good tourism governance in the implementation of the “One Village, One Event” Program. The research was conducted using qualitative methods, collecting data through literature review, observation, and interviews, which were then analyzed interactively using the techniques proposed by Miles & Huberman. The results indicate that the implementation of the “One Village, One Event” program in Tanah Datar Regency in 2024 has not yet been optimal based on the seven principles of good tourism governance. This program has demonstrated success in highlighting local cultural identity, increasing community participation in the implementation of activities, and strengthening the promotion and branding of Tanah Datar Regency as an “event regency.” However, the program has not yet been able to achieve sustainable tourism governance, as there are still limitations in the areas of strategic community participation, partnerships, human resource

capacity building, monitoring and evaluation, and the sustainability of program management following the conclusion of activities.

Key word: *Theory of good tourism governance, Satu Nagari Satu Event Program, sustainable tourism.*

PENDAHULUAN

Saat ini pemerintah berkomitmen kuat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata yang dijadikan sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif. Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, bahwa dua diantara tujuan kepariwisataan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana pariwisata menjadi salah satu urusan pilihan yang menjadi kewenangan daerah untuk memanfaatkan peluang kearifan lokal yang ada di masyarakat agar dapat meningkatkan pengembangan pariwisata, termasuk pengembangan wisata berbasis kearifan lokal, dan juga sebagai bentuk implementasi pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Pariwisata berkelanjutan ini mengedepankan optimalisasi manfaat kepariwisataan bagi masyarakat, dengan peran pemerintah hanya terbatas sebagai fasilitator dan regulator dalam tata kelola kepariwisataan. Masyarakat sebagai subyek pembangunan kepariwisataan, menjadi pelaku utama dan harus terlibat aktif dalam perencanaan serta implementasi program kegiatan kepariwisataan. Kemudian masyarakat sebagai penerima manfaat, harus mendapatkan nilai manfaat ekonomi yang signifikan, dan mampu meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan sosial, ekonomi dan budayanya dari pengembangan kegiatan kepariwisataan yang dilakukan.

Misi pembangunan kepariwisataan berlanjut akan terlaksana dengan baik apabila dalam proses pencapaiannya dilakukan melalui prinsip tata kelola kepariwisataan yang baik atau *Good Tourism Governance* (Sunaryo, 2013). Prinsip penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik mementingkan adanya proses koordinasi serta sinkronisasi program antar pemangku kepentingan dan pelibatan partisipasi aktif sinergis antara pemerintah, swasta/industri pariwisata, dan masyarakat setempat. Dampak positif atau negatif dalam pengelolaan suatu destinasi pariwisata akan

sangat bergantung pada bagaimana manajemen dan tata pengelolaan kepariwisataan yang diprankan oleh segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) tersebut.

Salah satu daerah kaya akan potensi pariwisata ialah Kabupaten Tanah Datar yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Dikenal sebagai daerah asal usul masyarakat minangkabau, sehingga memiliki potensi yang sangat besar di bidang budaya dan potensi wisata lainnya seperti alam, sejarah, hingga religi. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus melakukan pengembangan pariwisata dengan memanfaatkan potensi kearifan lokal yang dimiliki melalui misi keempat Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 yaitu “Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumberdaya alam”. Pemerintah daerah berkomitmen untuk mengoptimalkan pembangunan pariwisata sebagai sektor unggulan daerah dan sektor penting dalam menunjang perekonomian masyarakat Kabupaten Tanah Datar.

Visi misi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 ini kemudian didukung oleh 10 program unggulan yang dimuat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Salah satunya adalah Program Unggulan “Satu Nagari Satu Event untuk menunjang ekonomi kreatif, pelestarian kebudayaan, memajukan olahraga dan produk nagari”. Program ini sebagai program untuk mengembangkan industri ekonomi kreatif melalui *event event* pariwisata dan olahraga berbasis kearifan lokal dari masing masing nagari, sekaligus untuk pengembangan potensi pariwisata dan budaya di Tanah Datar.

Tujuan dari program ini adalah untuk menggali, melestarikan serta mempromosikan potensi pariwisata lokal baik wisata alam maupun budaya. Selain itu, melalui penyelenggaraan *event-event* kearifan lokal, program ini tidak hanya bertujuan untuk melestarikan budaya, namun juga untuk membuka peluang serta mendorong perekonomian lokal. Program ini secara konseptual merupakan salah satu wujud

kolaborasi pemerintah daerah dengan masyarakat, yaitu masyarakat nagari dengan konsep kegiatan partisipatif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat nagari yaitu tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, kalangan pemuda hingga perantau (Vanny & Frinaldi, 2024).

Satu Nagari Satu *Event*, artinya satu nagari di Kabupaten Tanah Datar menggelar satu *event* yang didasari atas potensi unggulannya, baik wisata alam maupun budaya. Terdiri dari berbagai macam rangkaian kegiatan seperti pawai tradisional, permainan tradisional, pertunjukan seni, hingga bazar UMKM. Menurut Bupati Tanah Datar Eka Putra di awal tahun 2023 tercatat sebanyak 700 ribu pengunjung datang ke Kabupaten Tanah Datar (Etri Saputra, 2023), yang mana sebagian besar datang dari penyelenggaraan Program Satu Nagari Satu *Event*. Setiap pelaksanaan satu nagari satu event rata-rata dikunjungi oleh 2000 hingga 3000 pengunjung.

Dalam implementasinya, Program Satu Nagari Satu *Event* sudah berlangsung dari tahun 2022 hingga tahun 2024, dan tercatat sudah diikuti oleh 62 dari 75 nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Pada tahun 2024 adanya angka penurunan pelaksanaan *event* nagari dari target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, yaitu hanya 22 dari 36 target. Maka saat ini masih terdapat 13 nagari yang belum pernah berpartisipasi dalam program.

Selain itu menurut peneliti terdahulu (Yuliana, 2025) berjudul “Evaluasi Program Satu Nagari Satu Event Kabupaten Tanah Datar” yang menggunakan teori evaluasi oleh William. N. Dunn untuk dasar analisis dengan Nagari Batu Bulek sebagai sampel analisis nya. Hasil penelitian menunjukkan program dikategorikan kurang efisien karena adanya keterbatasan kemampuan dalam manajemen sumber daya yang ada di nagari. Selain itu ditinjau dari kriteria responsivitas dan ketepatan hasilnya juga masih sama yaitu masih kurang optimal, dan akan lebih baik jika dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga akan berdampak untuk jangka panjang masyarakat.

Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi nagari dalam berpartisipasi pada program, sekaligus menjadi beberapa indikasi masalah serta kendala pada Program Satu Nagari

Satu *Event* berdasarkan studi kepustakaan, diantaranya :

1. Permasalahan sumber daya manusia, karena masyarakat nagari sebagai pelaksana *event*, cenderung belum memiliki gambaran mengenai penyelenggaraan suatu *event* pariwisata, dan juga belum mempunyai pengetahuan komprehensif mengenai tata kelola pariwisata hingga manajemen *event*. Tentu ini dapat berdampak terhadap penyelenggaraan program. *Event-event* kurang terkelola dengan baik hingga berpotensi tidak memenuhi standar kualitas event dan pariwisata.
2. Permasalahan kebijakan pendanaan atau biaya penyelenggaraan program menjadi kendala utama bagi nagari untuk berpartisipasi menggelar *event*. Pemerintah Daerah memberikan dana untuk penyelenggaraan Satu Nagari Satu Event pada setiap nagari sebesar Rp50.000.000 untuk nagari yang pertama kali melaksanakan program, sedangkan untuk nagari yang sudah pernah berpartisipasi hanya diberikan dana sebesar Rp10.000.000 dengan dalih bahwa nagari yang pernah berpartisipasi ini dapat lebih mandiri secara biaya dan mampu untuk mencari sponsor lainnya dalam menggelar suatu *event*.
3. Tujuan dari program ini tidak hanya untuk melestarikan budaya, namun juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat nagari. Namun dalam perjalanan program ini belum ditemukan manfaat jangka panjang yang berdampak signifikan terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat lokal. Hal ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi masyarakat nagari rata-rata meningkat hanya pada saat *event* digelar. Setelah kegiatan selesai aktivitas ekonomi masyarakat kembali normal karena tidak adanya mekanisme yang menjaga kesinambungan manfaat tersebut. Ini juga menunjukkan belum adanya langkah keberlanjutan yang pasti dari

pemerintah daerah maupun pemerintah nagari untuk program sehingga dampak yang dihasilkan dari segi ekonomi terhadap masyarakat hanya bersifat sementara.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul “*Good Tourism Governance Dalam Program Unggulan Satu Nagari Satu Event Di Kabupaten Tanah Datar*”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Mengumpulkan data melalui studi kepustakaan, serta studi lapangan yaitu observasi, wawancara, serta dokumen arsip penyelenggaraan program periode tahun 2024 baik milik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Nagari. Proses wawancara dilakukan melalui penentuan informan secara purposive, yaitu memilih informan yang paling mengetahui tentang Program Satu Nagari Satu Event. Bercirikan yaitu mereka yang memahami/menguasai, dan mereka yang tergolong berkecimpung/ terlibat dalam program.

Kemudian dilakukan pengujian keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, serta triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda seperti kepada sumber Disparpora melalui teknik wawancara dan dokumen. Selanjutnya data dianalisis secara interaktif dan terus menerus hingga tuntas, dan hingga datanya sudah jenuh dengan teknik yang dikemukakan Miles & Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip Partisipasi Masyarakat Dalam Program Unggulan Satu Nagari Satu Event di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024

Prinsip partisipasi masyarakat pada teori *Good Tourism Governance*, berarti melibatkan masyarakat setempat sejak awal, mulai dari penentuan visi, misi, tujuan pembangunan kepariwisataan, mengidentifikasi dan mengelola sumber daya serta mengimplementasikan rencana dan program yang telah disusun. Setelah

ditetapkannya suatu nagari untuk melaksanakan Program Satu Nagari Satu Event, nagari akan mengadakan rapat awal atau musyawarah bersama seluruh unsur kelembagaan nagari melalui BPRN (Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari) dan koordinasi dengan unsur tokoh masyarakat untuk memastikan kesepakatan serta keterlibatan masyarakat dalam menyelenggarakan Program Satu Nagari Satu Event.

Begitupun yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Balimbing dalam berpartisipasi pada Program Satu Nagari Satu Event. Sesuai dengan tema dan rangkaian kegiatan, keterlibatan masyarakat diperdalam hingga dalam bentuk partisipasi materi, yaitu masing masing kaum membawa satu *dulang* (nampan besar) yang berisikan makanan dan minuman untuk rangkaian kegiatan *makan bajamba* (makan bersama) dalam penyelenggaraan Satu Nagari Satu Event di Nagari Balimbing. Keterlibatan yang mendasar, berawal dari dukungan serta kesepakatan yang tercapai untuk menyelenggarakan program, hingga terlibat sebagai pelaku utama dalam proses implementasi program.

Dalam mengidentifikasi sumber daya yang diangkat serta dimanfaatkan sebagai tema dari Program Satu Nagari Satu Event, masyarakat Nagari Balimbing memilih makanan khas *gulai baluik pucuk palangeh*. Hal ini berarti ciri khas lokal tersebut menjadi unsur utama dalam kegiatan, yang merepresentasikan kekhasan masyarakat nagari dan membedakan Nagari Balimbing dengan nagari lain. Dalam proses implementasi kegiatan, rangkaian kegiatannya adalah pembuatan *gulai baluik pucuk palangeh* secara langsung oleh masyarakat nagari.

Sama halnya di Nagari Gurun yang juga diawali dengan rapat serta koordinasi seluruh kelembagaan di nagari, kemudian mengadakan sosialisasi dan musyawarah kepada masyarakat untuk meminta dukungan serta partisipasi. “*Festival Pesona Karupuak Ubi dengan Arak-Arakan 1000 Paruyen*”, menurut Wali Nagari Gurun, partisipasi masyarakat keempat jorong di Nagari Gurun sudah tergolong cukup baik sebagai panitia, hingga pelaksana kegiatan. Identifikasi sumber daya dalam penyelenggaraan program yaitu melalui makanan khas Nagari Gurun *karupuak ubi*. Makanan ini merupakan simbol budaya

sekaligus penggerak ekonomi masyarakat di Nagari Gurun, karena sebagian dari masyarakat gurun merupakan pelaku UMKM yang memproduksi makanan ini.

Kemudian Program Satu Nagari Satu *Event* ini awalnya merupakan inovasi calon kepala daerah sejak masa pencalonan pada Pilkada tahun 2020, dan telah tercantum dalam RPJMD tahun 2021-2026, serta diperjelas dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Roadmap Pelaksanaan Program Unggulan Dalam RPJMD Tahun 2021-2026. Kondisi ini menyebabkan ruang partisipasi masyarakat yang terbatas dalam tahapan awal perencanaan program, karena sudah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ini didukung dengan hasil wawancara dengan Bapak Elmas Dafri selaku Wali Nagari Gurun, yang menyatakan bahwa :

“Rasa memiliki masyarakat terhadap program lagi-lagi sebatas di hari pelaksanaan semata“

Jadi, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Program Satu Nagari Satu *Event* belum sepenuhnya memenuhi prinsip partisipasi masyarakat dalam *Good Tourism Governance* menurut Sunaryo. Masyarakat belum memiliki ruang yang memadai dalam menentukan arah kebijakan program maupun dalam pengelolaan keberlanjutan sumber daya pasca kegiatan. Dengan demikian, pola partisipasi yang terbentuk masih bersifat implementatif dan belum mencapai partisipasi yang bersifat strategis serta berkelanjutan.

2. Prinsip Keterlibatan Segenap Pemangku Kepentingan Dalam Program Unggulan Satu Nagari Satu *Event* di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024

Dampak positif atau negatif dalam pengelolaan kegiatan pariwisata bergantung pada bagaimana tata kelola kepariwisataan yang diperankan oleh para pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintahan, masyarakat hingga industri pariwisata. Maka dibutuhkan keterlibatan aktif dan produktif dari pemangku kepentingan dalam rangka pembangunan pariwisata. Namun hasil penelitian menunjukkan pola yang belum merata. Aktor pemerintah daerah, pemerintah nagari,

masyarakat, pelaku UMKM terlibat langsung dan aktif, namun stakeholder eksternal masih terbatas dan belum memberikan kontribusi signifikan.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga merupakan dinas penanggung jawab utama pelaksanaan Program Satu Nagari Satu *Event* yang berperan sebagai fasilitator dan stimulus, yaitu sebagai pembina, pembimbing, dan pendamping dari pelaksanaan program. Disparpora merancang serta melaksanakan program bersama dengan pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, Disparpora menunjukkan peran sebagai fasilitator yaitu dengan mengarahkan serta mendampingi nagari yang akan menyelenggarakan program. Disparpora juga memfasilitasi serta mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan antar stakeholders.

Pemangku kepentingan yang terlibat aktif dan dominan adalah pemerintah nagari beserta dengan lembaga-lembaga nagari lainnya sebagai motor penggerak sekaligus penyelenggara program mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga proses evaluasi dibawah binaan Disparpora. Berdasarkan hasil penelitian, peran pemerintah nagari bersama lembaga-lembaga nagari lainnya di Nagari Balimbing dan Nagari Gurun sudah dijalankan dengan aktif. Pemerintah nagari juga sebagai pihak utama yang melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta *stakeholder* terkait lainnya. Pemerintah nagari bersama tokoh masyarakat ini menjadi aktor penting yang memiliki ruang dalam menentukan kebijakan program kedepannya, karena sebagai motor penggerak dan pelaksana program di tingkat lokal sekaligus penghubung antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

Kemudian keterlibatan seluruh elemen masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan yaitu penyelenggara, pengisi acara, dan peserta event, sekaligus penerima manfaat dari adanya program ini, baik masyarakat di ranah maupun di rantau. Berdasarkan hasil penelitian, keterlibatan masyarakat Nagari Balimbing dan Nagari Gurun sudah berjalan baik dengan bertindak tuan rumah/ pelaku utama program. Kedua nagari sudah memastikan keterlibatan masyarakat nagari seutuhnya dalam rangkaian kegiatan dengan tidak melibatkan pihak luar. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan juga

adanya keterlibatan masyarakat nagari di rantau melalui ikatan keluarga besar masyarakat Nagari Balimbing dan Nagari Gurun di rantau dalam bentuk materil.

Kemudian pelaku UMKM yang terlibat dalam rangkaian kegiatan yang wajib yaitu pasar UMKM sebagai wadah untuk mengangkat dan memperkenalkan produk khas nagari agar terwujudnya tujuan dari Program Satu Nagari Satu Event yaitu memajukan produk nagari dan menunjang ekonomi kreatif. Namun dalam pelaksanaan program, para pelaku UMKM di nagari memperoleh nilai tambah hanya terbatas selama kegiatan berlangsung melalui pasar UMKM yang diselenggarakan. Ini menunjukkan keterlibatan pelaku UMKM untuk mendapatkan manfaat ekonomi masih bersifat sementara atau temporer.

Kemudian Disparpora juga membangun kerja sama dengan pihak swasta sebagai upaya mendukung event, perusahaan Smartfren dan PLN. Hal ini karena keterbatasan dana yang dimiliki nagari dalam menyelenggarakan sebuah event, sehingga nagari diberi kebebasan dalam mencari sumber dana tambahan lainnya, yang salah satunya dapat melalui sponsor pihak swasta. Namun, berdasarkan wawancara dengan Pemerintah Nagari Balimbing dan Gurun, tidak ditemui hal yang serupa. Pasalnya kedua nagari ini tidak melibatkan pihak swasta sebagai sponsor, melainkan hanya dengan memanfaatkan swadaya masyarakat nagari. Ini menunjukkan kemitraan antara pemerintah dan swasta seharusnya dapat mengatasi tantangan jangka pendek implementasi *Good Tourism Governance* dan menjamin kesinambungan program pembangunan pariwisata. Namun kerjasama pemerintah daerah dengan swasta ini belum dimaksimalkan dengan baik.

Selanjutnya pemangku kepentingan lainnya yang juga terlibat adalah perguruan tinggi. Adanya kerjasama yang dibangun oleh pemerintah daerah dengan kampus atau perguruan tinggi di kawasan Kabupaten Tanah Datar yaitu UIN Mahmud Yunus Batusangkar untuk pembinaan kepada nagari-nagari. Pemerintah daerah juga melibatkan tim kurator dari UIN Mahmud Yunus Batusangkar, STP Bandung, tokoh budayawan, dan seniman yang

berkolaborasi untuk mendampingi nagari-nagari dalam mengemas pelaksanaan event. Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama yang dibangun tidak berjalan optimal. Kerja sama tersebut cenderung bersifat simbolis dan tidak memiliki dampak nyata terhadap proses pengimplementasian program.

Tabel Keterlibatan Pemangku Kepentingan

No	Stakeholders	Jenis keterlibatan	Sifat Keterlibatan
1	Disparpora	Substantif	Aktif
2	Pemerintah Nagari	Substantif	Aktif
3	Masyarakat	Substantif	Aktif
4	UMKM	Substantif	Terbatas
5	Swasta	Simbolik	Terbatas
6	Perguruan Tinggi	Simbolik	Terbatas
7	Media	Substantif	Terbatas

Sumber : Olahan Peneliti, 2026

3. Prinsip Kemitraan Kepemilikan Lokal Dalam Program Unggulan Satu Nagari Satu Event di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024

Dalam kurun waktu dua hari penyelenggaraan, Program Satu Nagari Satu Event berdampak terhadap peningkatan pemasukan para pelaku UMKM dibandingkan dengan hari biasa. Terdapat 25 Pelaku UMKM yang terlibat di Nagari Balimbing dan 15 Pelaku UMKM di Nagari Gurun. Namun, dampak ini hanya berlangsung sementara pada periode kegiatan diselenggarakan saja.

Tabel Data Kunjungan dan Transaksi SNSE Nagari Balimbing dan Nagari Gurun

No	Nagari	Kunjungan	Transaksi
1.	Balimbing	1.000	75.000
2.	Gurun	1.000	75.000

Sumber : Dokumen Disparpora Tanah Datar, 2026

Namun dalam prinsip kemitraan kepemilikan lokal pada teori *good tourism governance*, peningkatan pendapatan selama kegiatan berlangsung tidaklah cukup. Fakta bahwa Nagari Balimbing dan Gurun baru berpartisipasi satu kali dalam penyelenggaraan program, tentu menjadi faktor pendukung lainnya mengapa program akhirnya belum mampu untuk menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat.

Selanjutnya ditinjau dari aspek kemitraan strategis yang juga belum dikembangkan, pasalnya di Nagari Balimbing maupun Nagari Gurun, usaha-usaha fasilitas pariwisata hampir belum ada, sehingga model kemitraan strategis itu belum dikembangkan dan dipelihara bersama masyarakat setempat. Kemudian aspek kepemilikan lokal yang mengedepankan relasi yang terjalin antara para pelaku bisnis dengan masyarakat setempat untuk menunjang kepemilikan lokal suatu usaha belum terpenuhi. Hal ini karena tidak adanya usaha-usaha pariwisata yang berkembang di nagari, namun banyaknya hanya berupa pelaku usaha kuliner UMKM mandiri dari nagari itu sendiri yang tidak hanya bergantung pada kegiatan kepariwisataan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kemitraan kepemilikan lokal dalam Program Satu Nagari Satu *Event* belum terpenuhi secara optimal. Meskipun program mampu meningkatkan pendapatan pelaku UMKM masyarakat lokal selama kegiatan berlangsung, manfaat ekonomi yang dihasilkan masih bersifat sementara dan belum berkembang menjadi aktivitas ekonomi wisata yang berkelanjutan. Selain itu, belum terbentuk kemitraan strategis yang mampu mendorong investasi, penciptaan lapangan kerja baru, maupun pengembangan usaha wisata lanjutan berbasis masyarakat.

4. Prinsip Pemanfaatan Sumber Daya Secara Berlanjut Dalam Program Unggulan Satu Nagari Satu *Event* di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024

Prinsip pembangunan kepariwisataan berarti harus menggunakan sumber daya yang dibutuhkan secara jangka panjang atau berlanjut. Berdasarkan hasil penelitian penyelenggaraan Program Satu Nagari Satu *Event* adalah dengan

memanfaatkan sumber daya yang umumnya berfokus pada pemanfaatan potensi sumber daya budaya. Potensi-potensi inilah yang diidentifikasi serta dimanfaatkan oleh masyarakat untuk diangkat sebagai tema penyelenggaraan program. Namun, setelahnya belum ada langkah pengembangan dan pengelolaan sumber daya yang dilakukan baik oleh pemerintah nagari maupun masyarakat sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program, belum ada upaya untuk menjamin penggunaan sumber daya dapat dipelihara dan diperbaiki.

Selain itu termasuk juga pemanfaatan sumber daya manusia nagari sebagai pelaku utama yang berpartisipasi dan melaksanakan kegiatan. Nagari hanya melibatkan sumber daya manusia masyarakat nagari itu sendiri, termasuk untuk pengisi acara. Seperti dalam rangkaian arak-arakan 1000 dulang Nagari Balimbing dan 1000 paruyen yang melibatkan masyarakat dalam jumlah besar pada kegiatan tersebut. Namun SDM yang terlibat dalam pelaksanaan Program Satu Nagari Satu *Event* ini belum terdapat langkah keberlanjutan yang khusus diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi. Belum adanya upaya pengembangan sumber daya manusia seperti melalui kegiatan pelatihan atau pembinaan kepada para pelaku UMKM, masyarakat nagari, hingga pengembangan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) bahkan dari sebelum kegiatan diselenggarakan hingga pasca kegiatan.

Berikutnya sumber daya yang menjadi pondasi penting lainnya adalah sumber daya pendanaan. Nagari yang akan menyelenggarakan program, pada dasarnya telah memiliki dana sebesar 50 juta yang bersumber dari fasilitas bantuan dana pemerintah daerah. Namun, dana ini belum mampu menutupi biaya keseluruhan penyelenggaraan program, sehingga nagari memiliki bantuan sumber daya pendanaan dari pihak lain. Dalam hal ini, Nagari Balimbing dan Nagari Gurun mengaku bahwa sumber dana lainnya yang mereka miliki adalah berasal dari bantuan ikatan masyarakat nagari di rantau. Bantuan dana sebesar 50 juta ini belum dapat dikatakan mampu menjamin keberlanjutan pendanaan program.

Maka dari itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya

dalam Program Satu Nagari Satu Event masih berada pada tahap identifikasi dan eksploitasi awal potensi lokal sebagai daya tarik kegiatan. Sumber daya budaya yang dimiliki nagari memang berhasil diangkat dan diperkenalkan kepada masyarakat luas melalui penyelenggaraan *event*. Namun, pemanfaatan tersebut belum diikuti dengan strategi pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan yang mampu menjamin keberlanjutan manfaat sumber daya di masa mendatang. Akibatnya, berbagai potensi budaya yang dimiliki nagari masih berfungsi sebagai atraksi temporer dalam kegiatan *event* dan belum berkembang menjadi aset wisata yang memberikan manfaat ekonomi maupun sosial secara berkelanjutan. Kondisi ini mencerminkan bahwa prinsip pemanfaatan sumber daya secara berlanjut sebagaimana yang dikehendaki pada teori *Good Tourism Governance* belum sepenuhnya terlaksana.

5. Prinsip Monitor dan Evaluasi Program Dalam Program Unggulan Satu Nagari Satu Event di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024

Berdasarkan teori *Good Tourism Governance*, pada penyelenggaraan suatu program hal yang penting diperhatikan adalah kegiatan monitoring selama program berlangsung serta tahapan evaluasi pasca program digelar. Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan monitoring dalam Program Satu Nagari Satu *Event* dimulai dari Disparpora sebagai penanggung jawab utama yang selalu mendampingi dan melakukan pemantauan terhadap nagari yang sedang menggelar program guna memastikan setiap proses berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan.

Pelaksanaan pemantauan ini juga dilakukan di tingkat nagari oleh pemerintah nagari, panitia pelaksana bersama tokoh lembaga kemasyarakatan di nagari. Berdasarkan hasil penelitian, skema monitoring penyelenggaraan kegiatan yang dilaksanakan oleh Nagari Balimbing dan Nagari Gurun adalah sama, yaitu dengan keterlibatan pemerintah daerah, pemerintah nagari beserta panitia pelaksana dan tokoh kemasyarakatan, tanpa adanya keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha lebih lanjut.

Berdasarkan hasil penelitian, skema evaluasi dampak dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melalui perbandingan data dari setiap pelaksanaan satu

nagari satu *event*. Data ini berupa jumlah kunjungan, jumlah pelaku UMKM yang berpartisipasi, serta transaksi yang terjadi selama kegiatan berlangsung. Data-data ini digunakan untuk melihat dampak awal dari program ini serta membandingkan setiap *event* yang terlaksana. Namun, evaluasi tersebut belum cukup didukung oleh indikator yang lebih terukur terkait keberhasilan implementasi program serta dampak terhadap aspek lainnya, seperti tingkat partisipasi masyarakat, peluang usaha yang muncul, serta melihat potensi untuk kegiatan ini terus dikembangkan. Begitupun dengan evaluasi keseluruhan yang belum dilakukan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa prinsip monitoring dan evaluasi dalam Program Satu Nagari Satu *Event* belum berjalan secara terstruktur dan mendalam. Kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan bersifat dangkal dan hanya terbatas pada beberapa pihak saja, terutama hanya diikuti oleh pemerintah daerah, pemerintah nagari hingga panitia pelaksana. Sehingga ini menunjukkan bahwa tata kelola kepariwisataan dalam program ini masih lemah karena monitoring dan evaluasi yang juga lemah sehingga sangat mempengaruhi keberlanjutan dari program tersebut.

6. Prinsip Pelatihan Kepada Masyarakat Terkait Dalam Program Unggulan Satu Nagari Satu Event di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024

Dalam teori *Good Tourism Governance*, menyatakan bahwa prinsip pelatihan kepada masyarakat terkait selalu dibutuhkan dalam pembangunan kepariwisataan berlanjut untuk membekali keterampilan serta pengetahuan masyarakat dan meningkatkan kemampuan bisnis secara *vocational* dan profesional. Berdasarkan hasil penelitian, kendala sumber daya manusia menjadi salah satu kendala utama yang dirasakan oleh Disparpora selaku penanggung jawab utama maupun oleh pemerintah nagari sebagai pelaksana di tingkat nagari. Masyarakat nagari sebagai pelaksana *event*, cenderung belum memiliki gambaran mengenai penyelenggaraan suatu *event* pariwisata dan belum memiliki pemahaman komprehensif tentang manajemen *event*. Tentu ini sangat berdampak terhadap standar kualitas *event* yang digelar, tata kelola kegiatan, inovasi

kegiatan hingga dampak pada keberlanjutan program.

Berdasarkan hasil penelitian, pada awal program ini akan dijalankan yaitu di awal tahun 2022, pemerintah daerah melakukan kegiatan pelatihan atau coaching dengan mengundang seluruh perwakilan nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga menandatangani nota kesepakatan kerjasama terkait dengan percepatan pengembangan destinasi wisata tanah datar dengan Politeknik Pariwisata NHI Bandung. Kesepakatan ini bertujuan untuk pengembangan serta peningkatan kemampuan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan ruang lingkup kegiatan pelatihan dan pendidikan bidang kepariwisataan (Info Politik, 2022).

Minimnya pelatihan menyebabkan kapasitas masyarakat dalam mengelola event masih sangat bergantung pada pendampingan pemerintah daerah. Kondisi ini menghambat kemandirian nagari dalam mengembangkan dan mengelola kegiatan kepariwisataan secara berkelanjutan. Meskipun pemerintah daerah telah memiliki komitmen untuk meningkatkan kapasitas SDM, tetapi mekanisme pelatihan pelaksanaannya belum intensif dan belum menjangkau seluruh nagari. Ini senantiasa juga dapat disebabkan oleh program yang lebih berorientasi pada penyelenggaraan event daripada pengembangan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan. Begitupun dengan kerja sama yang dibangun bersama Poltekpar dan UIN yang masih bersifat formal administratif dan belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam program.

7. Prinsip Promosi dan Advokasi Nilai Budaya Kelokalan Dalam Program Unggulan Satu Nagari Satu Event di Kabupaten Tanah Datar Pada Tahun 2024

Dalam teori *good tourism governance*, prinsip promosi dan advokasi nilai budaya kelokalan berarti pembangunan kepariwisataan secara berlanjut dan memerlukan program-program promosi, advokasi tentang penggunaan lahan untuk pariwisata serta kegiatan yang dapat memperkuat (*sense of place*) atau keunikan suatu daerah dan identitas budaya masyarakat dengan baik.

Nagari Balimbing menggelar program Satu Nagari Satu Event dengan tema "*Festival Pesona Seribu Dulang Gulai Baluik Pucuak Palangeh*" yang mengangkat ciri khas makanan gulai baluik pucuak palangeh yang disajikan dalam dulang untuk kegiatan makan bajamba atau makan bersama. Ini menunjukkan bahwa adanya kekuatan *sense of place* atau keunikan nagari yang dimanfaatkan dan diangkat sebagai tema kegiatan, dengan tetap melibatkan masyarakat nagari sebagai pelaku utama kegiatan. Sama halnya dengan Nagari Gurun, yang mengangkat serta memanfaatkan ciri khas nagari dengan tema "*Festival Pesona Karupuak Ubi dengan Arak-Arakan 1000 Paruyen*". Karupuak ubi adalah kerupuk tradisional yang terbuat dari ubi kayu sebagai simbol budaya sekaligus penggerak ekonomi Nagari Gurun. Dua ciri khas dari Nagari Gurun ini menggambarkan nilai semangat gotong royong serta kebanggaan komunitas dengan melibatkan seluruh masyarakat nagari.

Hal penting lainnya ialah promosi, sebagai langkah memperkenalkan budaya, mengajak wisatawan untuk datang serta bagaimana pelaksana memanfaatkan media yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, langkah utama promosi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar adalah melalui *calendar of event* yang dikeluarkan setiap tahunnya untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan pariwisata yang akan digelar di Tanah Datar, termasuk Satu Nagari Satu Event. *Calendar of event* ini bertujuan untuk memudahkan penggiat wisata serta *travel agent* dalam melakukan kunjungan wisata ke Kabupaten Tanah Datar dengan jadwal yang sudah pasti tertera.

Upaya promosi lainnya yang dilakukan adalah melalui media sosial, mulai dari media sosial pemerintah daerah hingga media sosial nagari yang melakukan promosi secara mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Satu Nagari Satu Event bukan hanya berfungsi sebagai kegiatan pariwisata, tetapi juga sebagai instrumen penguatan identitas budaya lokal. Melalui pengangkatan tradisi, kuliner khas, kesenian, dan simbol-simbol budaya yang dimiliki masing-masing nagari, program ini mampu memperkuat *sense of place* (karakter lokasi) serta membedakan karakter setiap nagari sebagai destinasi wisata budaya.

Pemerintah daerah memiliki komitmen dalam upaya mempromosikan budaya lokal dan potensi wisata melalui *Calendar of Event* dan media sosial. Namun strategi promosi yang lebih luas melalui platform digital pariwisata, influencer wisata, maupun melalui jaringan pemasaran destinasi (*travel agent*) belum terlihat secara optimal. Padahal upaya promosi yang dilakukan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan maupun memperkuat citra Kabupaten Tanah Datar sebagai kabupaten event.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Good Tourism Governance* dalam Program Unggulan Satu Nagari Satu Event di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan program belum terlaksana secara optimal berdasarkan tujuh prinsip *Good Tourism Governance* menurut Sunaryo (2013). Program ini telah menunjukkan keberhasilan dalam mengangkat identitas budaya lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, serta memperkuat promosi dan branding Kabupaten Tanah Datar sebagai kabupaten event. Namun demikian, program belum mampu mewujudkan tata kelola kepariwisataan yang berkelanjutan karena masih terdapat berbagai keterbatasan dalam aspek partisipasi strategis masyarakat, kemitraan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, monitoring dan evaluasi, serta keberlanjutan pengelolaan program pasca kegiatan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Program Satu Nagari Satu Event lebih berhasil sebagai instrumen promosi budaya dan branding daerah dibandingkan sebagai instrumen pembangunan pariwisata berkelanjutan. Keberhasilan program masih terpusat pada penyelenggaraan event, sementara aspek keberlanjutan ekonomi, penguatan kapasitas masyarakat, kemitraan strategis, dan tata kelola pasca kegiatan masih memerlukan perhatian yang lebih besar dari pemerintah daerah maupun pemerintah nagari.

SARAN

1. Peningkatan sinkronisasi informasi dan koordinasi program antara pemerintah daerah dengan pemerintah nagari mengenai kerjasama yang dibangun

dengan pihak eksternal serta kontribusi yang akan dihadirkan dalam pelaksanaan program di nagari. Maka, juga diperlukan adanya bentuk perjanjian kerjasama yang terstruktur dan terdokumentasi dengan baik oleh pemerintah daerah sehingga kebijakan kerjasama dapat terimplementasi secara operasional dengan baik kepada setiap nagari yang terlibat.

2. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar perlu membangun mekanisme kemitraan yang lebih terstruktur dengan sektor swasta melalui penyusunan skema sponsorship, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), serta kemitraan usaha yang dapat mendukung pembiayaan keberlanjutan Program Satu Nagari Satu Event.
3. Pemerintah daerah perlu merumuskan langkah serta strategi keberlanjutan program pengembangan wisata yang tidak berhenti pada penyelenggaraan event, namun menuju pada orientasi pengembangan pariwisata berkelanjutan sebagaimana strategi arah kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.
4. Memaksimalkan kerjasama yang telah dibangun dengan perguruan tinggi, termasuk dengan perguruan tinggi di Kabupaten Tanah Datar sebagai upaya menjawab tantangan implementasi *Good Tourism Governance*, diantaranya tantangan sumber daya manusia.
5. Pemerintah daerah harus melakukan evaluasi keseluruhan dari program dengan mekanisme yang jelas, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik. Bukan hanya berupa pencatatan data kunjungan serta transaksi event, namun mencakup keseluruhan aspek dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriwiguna, A. (2022). *Kebijakan Pembangunan Pariwisata* (M. Prayudha, Ed.). Bintang Semesta Media
- Aydini, R., & Syafril, R. (2024). Implementasi Program Satu Nagari Satu Event (SNSE) Sebagai Program Unggulan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar

- dalam Melestarikan Kebudayaan Lokal. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 12(1), 137–146. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v12i1.216>
- Diskominfo Kabupaten Tanah Datar. 1000 Katidiang Saok Meriahkan SNSE Nagari Tanjung Alam. 30 Juni 2025. Diakses pada 13 Oktober 2025. <https://tanahdatar.go.id/berita/1000-katidiang-saok-meriahkan-snse-nagaritanjung-alam>
- Emzir. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. PT Rajagrafindo Persada
- Etri Saputra. (2023). *Satu nagari satu event salah satu daya tarik wisatawan ke Tanah Datar*. Antara Sumbar. <https://sumbar.antaranews.com/berita/567975/satu-nagari-satu-event-salabsatu-daya-tarik-wisatawan-ke-tanah-datar>
- Feby Hidayat, Frinaldi, A., & Magriasti, L. (2023). “Satu Nagari Satu Event” Sebuah Upaya Untuk Kemajuan Kabupaten Tanah Datar. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 115–124. <https://doi.org/10.25299/jiap.2023.12875>
- Kementerian Pariwisata RI. *Siaran Pers: Menteri Pariwisata: Pemerintahan Prabowo-Gibran Terus Jadikan Pariwisata Sebagai Pilar Pembangunan*. 29 Juli 2025. Diakses pada 3 September 2025. <https://www.kemenpar.go.id/berita/siaran-pers-menteri-pariwisatapemerintahan-prabowo-gibran-terus-jadikan-pariwisata-sebagai-pilarpembangunan>
- Nugraha, F. A., Sukristiyanto, A., & Basyar, dan M. R. (2024). Good Tourism Governance Pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Sebagai Desa Wisata Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(12)
- Oktavio, N. *Memperkuat Ekonomi dan Sosial melalui Sektor Pariwisata*. Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia 21 April 2025. Diakses pada 11 Oktober 2025. <https://setkab.go.id/memperkuat-ekonomi-dan-sosialmelalui-sektor-pariwisata/>
- Photography, G. M. (n.d.). “Baraja” Pemkab Tanah Datar Launching Satu Nagari Satu Event. 2 Maret 2023. Retrieved <https://gajahmaharamphotography.co.id/baraja-pemkab-tanah-datar-launching-satu-nagari-satu-event/>
- Redaksi Jurnal Minang. *Bupati buka secara resmi Satu Nagari Satu Event di Nagari Labuah*. 13 April 2024. Diakses pada 2 Desember 2025. <https://jurnalminang.id/bupati-buka-secara-resmi-satu-nagari-satu-eventdi-nagari-labuah/>
- Redaksi Jurnal Minang. *Satu Nagari Satu Event di Salimpaung digelar, ini rangkaian acaranya*. 2 desember 2024. Diakses pada 13 Oktober 2025. <https://jurnalminang.id/satu-nagari-satu-even-di-salimpauang-digelar-inirangkaian-acaranya>
- Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar. <https://ppid.tanahdatar.go.id/files/text/09b78866439220f23f233b98d401f47e.pdf>
- Sabana Kaba. *Lima Nagari Mundur, Progul Tanah Datar Satu Nagari Satu Event Tetap Lampau Target*. 13 September 2023. Diakses pada 12 April 2025. <https://sabanakaba.com/baru/lima-nagari-mundur-progul-tanah-datar-satunagari-satu-event-tetap-lampauitarget/15867/>
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Cetakan Pe). Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Suharsaputra, U. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Tindakan*. Refika Aditama.
- Sunaryo, B. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media.
- Tanah Datar Go. *Pemkab Tanah Datar*

Matangkan Persiapan Satu Nagari Satu Event. 15 April 2022. Diakses pada 3 Mei 2026.

<https://tanahdatar.go.id/berita/pemkab-tanah-datar-matangkan-persiapansatu-event-satu-nagari>

Utamy, W. A., Susanti, E., & Runiawati, N. (2023). Good Tourism Governance Dalam Pengelolaan Ekowisata Mangrove Kampung Teluk Semanting Kabupaten Berau. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(2), 658–666.

Vanny, D., & Frinaldi, A. (2024). Peran Inovasi Program Satu Nagari Satu Event terhadap Pemberdayaan Ekonomi Lokal di Tanah Datar. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)* 12(September), 310–319.

Yuliana, F. (2025). Evaluasi Program Satu Nagari Satu Event Kabupaten Tanah Datar. *Journal of Public Administration Review*, 2(1), 205–221. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar/article/view/21668%0Ahttps://journal.uir.ac.id/index.php/jpar/article/download/21668/8408>